









	<b>SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</b>	Nomor SOP	017/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-PPK/06/2022
		Tgl. Ditetapkan	19/03/2018
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
		Ditetapkan Oleh	DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT    <u>Capt. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001
<b>TARUNA MENERIMA TAMU</b>			
<b>ISO 9001:2015</b>			
<b>Dasar Hukum :</b>		<b>Cara Mengatasi :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kelautan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;</li> <li>6. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 100 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;</li> <li>7. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan;</li> <li>8. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut;</li> <li>9. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan</li> <li>10. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>11. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. KM 43 tahun 2008 tentang pendidikan dan pelatihan, dan ujian keahlian, serta sertifikat kelautan;</li> <li>12. Peraturan Menteri perhubungan RI No. KM 52 tahun 2007 tentang pendidikan dan pelatihan transportasi;</li> <li>13. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;</li> <li>14. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.11/ BPSDMP-2014 Tentang Pola Pengasuhan Taruna/i Diklat Pembentukan pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;</li> <li>15. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan No. SK. 2163/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Keahlian Pelaut Tingkat III non Diploma (Crash Program/ Fast Track);</li> <li>16. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan No. SK. 2162/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan;</li> </ol>		Dilakukan kegiatan Taruna Menerima Tamu sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.  <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>DOKUMEN INDUK</b> </div>	

<p>17. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan nomor SK.827/HM.208/VII/Diklat-07 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Disiplin Peserta Diklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;</p> <p>18. STCW No. 1978 dan Amandemennya;</p> <p>19. ISO 9001:2015, Klausul 7.5.3. Pengendalian Informasi Terdokumentasi, Klausul 8.5. Pengendalian Produksi dan Jasa.</p>	
<p><b>Keterkaitan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Mutu Poltekpel Sumbar;</li> <li>2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi.</li> </ol>	<p><b>Peralatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer;</li> <li>2. Printer;</li> <li>3. Lembar Kerja.</li> </ol>
<p><b>Peringatan :</b></p> <p>Apabila SOP Taruna Menerima Tamu tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	

SOP TARUNA MENERIMA TAMU									
NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		PPK, PAGA/ PAWAS	TARUNA	SATPAM	TAMU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memakai pakaian rapi dan bersepatu dan Tamu wajib melapor kepada Satpam, mengisi buku tamu dan menunggu di ruang tunggu jaga. Serta mematuhi semua aturan bertamu yang disampaikan satpam (seperti tidak membawa makanan)					Buku tamu	5 Menit	Buku tamu terisi	-
2	a. Memakai pakaian dinas PDH saat menerima tamu dan meminta izin kepada PAGA/PAWAS. b. Menerima tamu ditempat yang telah ditentukan dengan seijin Paga.					Pakaian dinas	20 Menit	a. Taruna berpakaian rapi b. Penerimaan tamu menjadi tertib	-
3	Menerima panggilan untuk menemui tamu, menjemput tamunya di ruang tunggu jaga, membawa tamu tersebut ke tempat penerimaan tamu dan mempersilakan tamu mengambil tempat terlebih dahulu					Pakaian dinas	5 Menit	Penerimaan tamu menjadi tertib	-
4	Menetapkan Waktu, tempat dan prosedur penerimaan tamu oleh Pusat Pembangunan Karakter					Pakaian dinas	5 menit	Penerimaan tamu menjadi tertib	-
5	Melarang untuk tidak menerima tamu di dalam kamar asrama					Pakaian dinas	1 menit	Penerimaan tamu menjadi tertib	-
6	Memberikan kesan yang baik dan menyenangkan selama menerima tamu					Pakaian dinas	1 menit	Penerimaan tamu menjadi tertib	-
7	Memerintahkan Taruna untuk mengusahakan dapat berbicara sebentar dengan tamu tersebut					Pakaian dinas	5 Menit	Penerimaan tamu menjadi tertib	-
8	Mengakhiri pertemuan dengan sopan dan mengantarkan tamu untuk berpamitan dengan PAGA/PAWAS.					Pakaian dinas	1 menit	Penerimaan tamu menjadi tertib	-

**RIWAYAT PERUBAHAN SOP TARUNA MENERIMA TAMU**

<b>NO.</b>	<b>ISI PERUBAHAN</b>	<b>TANGGAL BERLAKU</b>
01	Perubahan format SOP sesuai PM.No.50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan	04/07/2019
02	Penambahan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	18/06/2020
03	- Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat  Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat  Perubahan tanda tangan pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	23/06/2022